



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, Website : www.badilum.info PO BOX 1148 Jkt 13011 JAT

Nomor : 34/DJU3/KU01/3/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan data dan konfirmasi saldo keuangan perkara

Jakarta, 21 Maret 2018

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 147/SEK/KU.00/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan surat Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Nomor 04/LK-MA/02/2018 tanggal 21 Maret 2018 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri agar segera memenuhi permintaan data sebagaimana terlampir.

Adapun data yang dibutuhkan antara lain :

1. Lampiran 1 s.d 4 validasi keuangan perkara
2. Rekening koran dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dalam bentuk scan pdf. (12 dokumen)
3. Berita acara penutupan kas dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dalam bentuk scan pdf. (12 dokumen)
4. Penutupan buku induk keuangan perkara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dalam bentuk scan pdf. (12 dokumen)
5. BAST atau dokumen pendukung penyerahan dan penerimaan konsinyasi dan titipan pidana pada tahun 2017 dalam bentuk scan pdf.
6. Penutupan Buku Jurnal Keuangan PHI dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 dalam bentuk scan pdf. (12 dokumen)

Untuk pemenuhan data tersebut dilakukan dengan membuka alamat website pelaporan.badilum.info dan menginput data serta mengupload dokumen pendukung. Data diinput dan diupload paling lambat tanggal 28 Maret 2018 dengan ketentuan data sudah dipastikan benar dan sudah dilakukan validasi.

Demikian untuk segera dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

**a.n. DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR PEMBINAAN
ADMINISTRASI PERADILAN UMUM,**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (sebagai laporan)